

Karyo 507

SEMINAR NASIONAL

**PENINGKATAN PERAN FPTK/JPTK DALAM MENGEMBANGKAN
TENAGA KERJA PROFESIONAL MENGHADAPI PJP II**

**DAN TEMUKARYA VIII
FORUM KOMUNIKASI FPTK IKIP, DAN JPTK UNIVERSITAS
SE-INDONESIA**

TANGGAL 14 s.d 17 NOPEMBER 1995

**USAHA-USAHA PENINGKATAN FUNGSI WORKSHOP
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF DALAM
RANGKA SWAKELOLA**

Oleh:

**Drs. Bahrul Amin
FPTK - IKIP Padang**

PAJIL 15
SEMESTER 1995
DITERIMA
DITOLAK
DITUNDA

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL	06 MARET
SUMBER / HARGA	K 1
KOLEKSI	KT
NO. INVENTARIS	267/10/97 - P1 (2)
KLASIFIKASI	378.729 AMI 1



**FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG**

**MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG**



**SEMINAR NASIONAL DAN TEMUKARYA VIII
FORUM KOMUNIKASI FPTK IKIP, DAN JPTK UNIVERSITAS SE-INDONESIA**

Alamat Sekretariat

FPTK IKIP Padang, Jln. Prof. Dr. HAMKA, Air Tawar - Padang (25131) Telp. 55644 dan 51260, Pes.215 - Fax. 55628

Nomor : 34/Pan.SEMFORK VIII/1995
Hal : Undangan Pemakalah

7 Nopember 1995

Yth. Sdr. Drs. Bahrul Amin
FPTK IKIP Padang
Padang

Dengan hormat

Dalam rangka "Seminar Nasional dan Temu Karya VIII Forum Komunikasi (FPTK) IKIP dan Jurusan Pendidikan Teknologi (JPT) Universitas se-Indonesia pada tanggal 14 Nopember 1995 di Padang, panitia mengangkat tema : Peningkatan Peran FPTK-JPTK dalam mengembangkan tenaga kerja profesional menghadapi PJP II.

Sehubungan dengan itu, kami mengundang Saudara untuk menyajikan makalah pada acara tersebut dengan judul ;

"Usaha-usaha peningkatan fungsi workshop jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dalam rangka swakelola"

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia,

Drs. Amrizal Arief
NIP. 131288580

USAHA-USAHA PENINGKATAN FUNGSI WORKSHOP JURUSAN
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF DALAM RANGKA SWAKELOLA

Oleh :

Drs. Bahrul Amin

(FPTK IKIP PADANG)

1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi sebagai suatu institusi pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena titik berat semua kegiatannya adalah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pendidikan Tinggi selain mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni juga menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Perguruan Tinggi sebagai suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya harus memiliki asset berupa sumber daya manusia, sumber daya operasional, dan sumber daya finansial (sumber dana). Senada dengan hal ini mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan sarana berupa 5 M (man, money, material, mechine, method). Jelas kelihatan bahwa uang menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu organisasi.

Pemerintah dengan PP nomor 30 tahun 1990 tentang himbauan kepada Perguruan Tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri untuk berusaha mengelola diri sendiri dalam rangka program Pemerintah untuk memberikan otonomi kepada semua perguruan tinggi. Dapat mengelola diri sendiri (swakelola) dan dapat otonom, berarti perguruan tinggi yang bersangkutan harus bisa mencari dana sendiri (swadana) atau dengan kata lain perguruan tinggi harus mampu mengembangkan sendiri dana yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, diluar anggaran belanja yang

derasal dari Pemerintah. Selama ini dana pendidikan maupun pembangunan perguruan tinggi umumnya masih bergantung pada kebijakan Pemerintah, yang biasanya keluar dari anggaran belanja negara ditambah dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Tetapi semenjak beberapa tahun terakhir ini, anggaran belanja yang tersedia semakin menurun. Dengan menurunnya anggaran belanja dari Pemerintah, ini berarti semua kegiatan yang selama ini dananya terpenuhi, dengan terpaksa harus mampu mengatur dana yang jumlahnya semakin mengecil.

Bagaimana dan apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal di atas, tidak ada jawaban pasti. Masalah ini pernah menjadi polemik yang hangat di masyarakat, dimana Perguruan Tinggi dalam usaha mencari dana tambahan dianggap menyimpang dari tujuan Perguruan Tinggi dan dianggap mengkomersilkan asset Pemerintah. Terlepas dari polemik yang terjadi, merupakan suatu kelaziman bagi masyarakat Perguruan Tinggi melakukan terobosan-terobosan dalam upaya mencari sumber dana lain di tangan minimnya anggaran yang disediakan Pemerintah. Masyarakat Perguruan Tinggi dituntut untuk berupaya meraih sumber dana dalam rangka pengembangan proses pendidikan di masing-masing perguruan tinggi. Banyak cara yang dapat dilakukan, namun kesemuanya terpulang dari situasi, kondisi dan orientasi masing-masing perguruan tinggi:

2. PERMASALAHAN

Dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi, mau tidak mau memerlukan dana operasional yang cukup tinggi. Sumber dana perguruan tinggi dapat diperoleh dari berbagai pihak. Menurut UU No.2 tahun 1989 pasal 36 bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pasal 25 mengatakan bahwa peserta didik wajib untuk menanggung biaya

penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP nomor 30 tahun 1990 pasal III, butir (1), menyatakan bahwa biaya perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri. Dana dari Pemerintah biasanya terealisasi dalam DIK (anggaran rutin) dan DIP (anggaran pembangunan). Dana dari luar negeri biasanya berupa Loan dan Grant, sedangkan dari masyarakat ternyata paling banyak ragamnya dan paling mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka swakelola dan swadana perguruan tinggi. Penerimaan tersebut antara lain : SPP, biaya seleksi masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, sumbangan dan hibah dari perorangan - lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan penerimaan dari masyarakat lainnya.

Dari sumber-sumber tersebut di atas baru beberapa saja yang dapat digali secara efektif. Otonomi Perguruan Tinggi dalam bidang keuangan menuntut perguruan tinggi untuk lebih menggalakan dan lebih meningkatkan penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat, sebab dengan otonomi tersebut cenderung perguruan tinggi melaksanakan swadana.

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif merupakan salah jurusan yang terdapat pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) IKIP Padang. Jurusan ini bertujuan untuk mendidik tenaga kependidikan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang otomotif. Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu diantaranya adalah workshop. Keberadaan workshop ini merupakan bagian pusat kegiatan ilmiah dalam rangka pembenahan proses belajar mengajar, khususnya dalam pengaplikasian teori-teori otomotif. Sarana dan prasarana yang ada pada jurusan Pendidikan Teknik Otomotif berasal dari bantuan Fourth Bank Education Project, disamping beberapa peralatan diataranya berasal dari bantuan PT.Caltex dan PT.Astra.

Dengan adanya peralatan yang boleh dikatakan cukup memadai ini, maka bagaimana usaha kita untuk meningkatkan fungsi workshop jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dalam rangka pelaksanaan otonomisasi pengelolaan perguruan tinggi.

3. ALTERNATIF PEMECAHANNYA

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa sarana dan prasarana yang ada pada jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FPTK IKIP Padang sudah cukup memadai, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Untuk menjaga kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan perawatan terhadap fasilitas, diperlukan dana yang cukup besar, sementara dana yang bersumber dari Pemerintah relatif kecil. Untuk ini perlu dicari alternatif pencarian dana untuk mengatasi hal di atas. Berikut ini beberapa alternatif yang dapat penulis sampaikan antara lain :

a. Mengadakan Unit-Unit Pelayanan

Unit-Unit Pelayanan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayan jasa maupun pelayanan barang. Unit-Unit ini menjalani fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah maupun swasta. Unit pelayanan ini dapat berupa kursus keterampilan mekanik otomotif, kursus mengemudi kendaraan, Perbaikan mesin kendaraan, mengecat kendaraan, biro konsultasi kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, biro konsultasi Pendidikan Otomotif, dan lain-lain yang pada prinsipnya mampu dilayani di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif.

Dalam prakteknya, pengelolaan unit pelayanan ini tidak selalu berjalan mulus, banyak kendala yang harus dihadapi dalam memajukan kegiatan ini. Oleh karenanya banyak dituntut pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, dan tidak sedikit pula

pengorbanan materi yang harus dikeluarkan. Pada awalnya, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan sosial baik ke dalam kampus maupun ke luar kampus agar masyarakat mengetahui produk-produk pelayanan apa saja yang kita hasilkan. Ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Dalam proses pendekatan sosial, dapat dilakukan melalui lobyng pada suatu kesempatan, menyebarkan pamflet atau brosur-brosur, maupun pemasangan iklan di media massa dalam beberapa hari. Biasanya tanggapan masyarakat pada awalnya baru berupa menanyakan informasi tentang lembaga layanan yang kita berikan dan belum mempunyai minat untuk menggunakannya. Disini kita dituntut untuk sabar sewaktu melayani pertanyaan masyarakat.

b. Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar

Selama ini masyarakat Perguruan Tinggi dianggap masih sangat kurang dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah ataupun pihak swasta dimana tempat mereka berada, walaupun ada kadang-kadang sifatnya adalah perorangan. Padahal masing-masing pihak sangat memerlukan hubungan kerjasama tersebut.

Perguruan Tinggi adalah sumber tenaga terdidik serta pengembang ilmu dan teknologi. Pemerintah Daerah membutuhkan perguruan tinggi sebagai produsen sarjana yang akan menjalankan pemerintahan dan merencanakan pembangunan, begitu pula Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga-tenaga yang ada di perguruan tinggi untuk membantu menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang ada di tengah masyarakat, baik melalui program pendidikan, pengabdian pada masyarakat maupun penelitian. Demikian juga halnya dengan pihak swasta/perusahaan-perusahaan, bila ingin maju sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga sarjana dalam berbagai bidang ilmu. Untuk meneliti suatu masalah yang timbul pada perusahaan atau untuk membuat suatu perencanaan pengembangan

dan konsultasi adalah sangat efektif dan efisien bagi perusahaan untuk memanfaatkan tenaga perguruan tinggi yang ada di sekitarnya.

Memang diakui bahwa tidak mudah untuk mengadakan kerja sama dengan pihak swasta, khususnya perusahaan yang besar. Namun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Banyak cara dan peluang yang dapat dilakukan untuk menjalin kerja sama ini, misalnya dengan memperkenalkan potensi-potensi unggulan yang kita miliki. Selain dari itu kita juga diharapkan tidak cepat patah hati bila suatu ketika tidak ada tanggapan dari mereka, yang jelas bahwa kita mempunyai kegigihan yang tinggi. Hal lain juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan alumni yang bekerja di perusahaan tersebut. Melalui dia kita dapat mengetahui informasi tentang keadaan perusahaan tersebut dan kalau mungkin melalui alumni ini pula kerja sama dibina.

Kerjasama juga dapat dilaksanakan antar departemen, misalnya dengan Departemen Sosial, Perindustrian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Departemen lainnya yang membutuhkan jasa Perguruan Tinggi, khususnya yang berhubungan dengan dunia otomotif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka untuk memungkinkan terlaksananya upaya-upaya swakelola yang dapat dilakukan pada jurusan Pendidikan Teknik Otomotif perlu kiranya menempuh taktik dan strategi sebagai berikut :

- a. Sebarkan informasi kepada calon pelanggan/masyarakat tentang potensi dan keunggulan-keunggulan yang kita miliki, baik melalui kegiatan penyuluhan, pemberian ceramah, penerbitan brosur, pamflet dan lain sebagainya

temen terkait, pihak swasta dalam setiap kegiatan yang kita lakukan.

- c. Agar usaha-usaha di atas dapat terwujud dengan baik, titik sentralnya adalah kemampuan profesional pengelola serta pelayanan dan harga yang harus bisa bersaing dengan pihak luar.
- d. Mengingat sulitnya mengadakan kerja sama dengan pihak luar, maka hendaknya kita dapat memanfaatkan setiap ada kesempatan, serta harus aktif dalam menjual gagasan-gagasan yang sejalan dengan permasalahan yang sedang hangat.

KI
378.124
AMI
R1

267/k/97 - P, (2)

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 1990,
Jakarta, Sinar Grafika, 1991

Slamet Rahmadi, *MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA*, Jakarta,
CV.Miswar, 1989

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Nomor 2 Tahun 1989,
Jakarta, Sinar Grafika, 1991